

BALI DI SIMPANG IDENTITAS

(sebuah tinjauan multikultur)

Oleh: NI MADE PURNAMA SARI

*Aku bukan ini atau itu
bukan muslim atau yahudi
bukan syeikh atau santri
aku tak punya suku, agama, atau maqam*

(Jalaluddin Rumi, Diwan Syamsi Tabriz)

Jalaluddin Rumi, penyair Persia yang tersohor itu, telah mencetuskan kesadaran luhur akan multikultur semenjak berabad-abad lampau. Kendati masih terdapat berbagai pertentangan seputar kehidupan pribadi serta kecenderungan pemikirannya, tak dapat disangkal lagi, gagasan serta kegelisahan Rumi, utamanya dalam hal kesetaraan dan rasa persaudaraan dalam berbangsa, merupakan suatu lompatan jauh ke depan guna merefleksikan kehidupan bermasyarakat yang berbhinneka.

Lantas, bagaimana dengan kekinian kita? Masihkah kita, sebagai bagian dari bangsa Indonesia menyadari sekaligus menghormati adanya keberagaman? Bagaimana dengan Pulau Bali sendiri, bagaimana caranya menyikapi fenomena silang budaya, mayoritas-minoritas, serta berbagai wacana di seputar keberagaman?

Bali: Antara yang Lokal, Nasional dan Global

Jean Couteau, antropolog asal Perancis, yang juga kritikus seni mumpuni, telah lama menuliskan gagasan-gagasannya mengenai pulau Bali. Tengok saja pengantarnya yang tercantum pada kumpulan cerpen Putu Fajar Arcana yang bertajuk Samsara. Ia menyatakan bahwa jarang suatu tempat diwacanakan secara sedemikian kuat dan normatif seperti Pulau Bali, hingga terkonstruksi suatu pandangan tentang kebudayaan dan masyarakat itu yang, meskipun jauh dari situasi yang sesungguhnya, dianggap lebih 'nyata' dari kenyataan itu sendiri dan bahkan lambat laun menjadi bagian yang tak terpisahkan. Ia juga menambahkan bahwa selama ini Bali selalu diandaikan sebagai sepotong surga terakhir atau tanah dewata yang tersisa di bumi. Akibat pandangan stereotip yang dikumandangkan terus-menerus ini, lahirlah sosok semu 'ideal' di samping sosok yang senyatanya. Selama sekian masa, penduduknya tumbuh dalam sebuah dunia 'citraan' yang lambat-laun mengaburkan identitas orang Bali sendiri. Hal ini yang kemudian menimbulkan alienasi kultural yang lilitannya amat sulit dilepaskan, serta melekat pada hidup juga cara pandang sehari-hari.

Sebagai sebuah wilayah yang sangat dijaga citraannya, baik oleh pemerintah Belanda, lebih-lebih lagi pada era Orde Baru, kesadaran keindonesiaan yang dimiliki masyarakat Bali, bolehlah dikata, tak tumbuh sepesat daerah-daerah lainnya. Hal ini tecermin dari beberapa fakta di masa lalu, yaitu pada zaman kolonial, ketika Indonesia belum merdeka, masyarakat Bali lebih sering menyebutkan diri sebagai Orang Bali. Tahun 1917, hampir

satu dekade setelah berdirinya organisasi bersifat nasional Boedi Oetomo (1908), golongan intelektual Bali barulah mendirikan sebuah wadah bernama Setiti Bali. Perkumpulan ini memiliki misi dalam bidang keagamaan, pendidikan dan kesejahteraan. Di samping itu, ia juga memiliki motif politik, yakni mengkonter kehadiran Sarekat Islam yang sebelumnya mendirikan cabang di Singaraja, Bali Utara (Picard 1999:25). Pendeknya, konsep nasionalisme yang diperjuangkan Setiti Bali adalah *ethno-nasionalism*. Dalam organisasi ini, mereka menonjolkan diri sebagai orang Bali, bukan orang Indonesia.

Selain itu, terdapat beberapa organisasi lain yang masih bersifat kedaerahan antara lain Catur Wangsa Derya Agama Hindu Bali dan Surya Kanta (1920-an), serta Bali Dharma Laksana juga Putri Bali Sadar (1930-an). Lemahnya kesadaran nasionalisme ini dapatlah dipahami sebagai akibat dari upaya Pemerintah Kolonial membentengi Bali dari penyebaran pengaruh Islam dan nasionalisme ke Indonesia Timur (Robinson 1995).

Multikultur di Bali

Meskipun demikian, masyarakat Bali amat menghargai keberagaman. Bali telah mengalami kontak dengan etnik dan budaya lain sejak awal masehi, misalnya dengan India melalui kegiatan perdagangan (Ardika 2003). Hubungan ini terus berlanjut dengan migrasi, perdagangan regional, kolonialisme, dan kemudian industri pariwisata. Kendati mayoritas penduduknya adalah etnik Bali beragama Hindu, terdapat fakta sosio-kultural yang menyatakan bahwa sejak lama pulau kecil ini pun dihuni oleh orang-orang Cina, Arab, India, Jawa, Bugis, Flores, serta etnis lain yang memiliki latar belakang serta budaya yang berbeda. Bahkan, sejak maraknya pariwisata, kaum ekspatriat juga turut mewarnai pluralisme di Bali. Maka, tak pelak, Bali pun memperoleh *record* sebagai salah satu masyarakat yang paling toleran di Indonesia (Darma Putra 2008:122).

Penerapan multikulturalisme di Bali dapat ditinjau dari beberapa hal, seperti sastra tradisional, yang umumnya berupa *kakawin*, yang kerap pula memuat kisah-kisah dari India, seperti Ramayana dan Mahabaratha. Dalam perkembangannya, epos ini digubah menjadi sekian versi dengan mengambil bentuk penulisan puisi dalam bahasa Jawa Kuna. Selanjutnya, bentuk sastra yang memakai bahasa Melayu atau Indonesia pun mulai bermunculan. Namun, ide cerita tak hanya berasal dari India, tetapi dari Cina dan Timur Tengah.

Berikut merupakan salah satu contoh puisi yang menunjukkan kuatnya kesadaran multikultur di Bali.

Assalamualaikum
Surya Kanta datang mengedari
Selamat sekalian isi negeri
Kecil besar laki istri
Senang sentosa setiap hari
(WD, Surya Kanta, Oktober 1925)

Cuplikan sajak yang dimuat pada edisi pertama majalah Surya Kanta ini menggunakan tajuk yang berupa ungkapan salam agama Islam, yaitu *Assalamualaikum*. Sementara itu,

isi puisi tersebut lebih berupa ajakan bagi seluruh penduduk Bali untuk membaca media cetak tersebut. Penulisnya memilih untuk menggunakan inisial WD, yang huruf pertamanya diduga merupakan awalan dari kata Wayan, sebuah sebutan 'putra sulung' untuk warga Bali.

Selain menggunakan perpaduan dengan unsur etnis Islam di atas, terdapat juga karya yang berupaya memadukan sastra tradisional dengan cerita Cina. *Geguritan Sampik*, demikian judulnya. Adapun penggubahnya adalah Ida Bagus Ketut Sari dari Sanur pada tahun 1915, berdasarkan sebuah cerita rakyat Cina yang bertajuk *Sam Pek Ing Taij*. Naskah sumbernya berbahasa Melayu, ditulis oleh Boeng Sing Hoo, terbitan tahun 1885. Setelah diubah menjadi geguritan, naskah ini banyak disalin di Bali serta kerap dipentaskan dalam berbagai kesempatan.

Di samping itu, khazanah sastra tradisional Bali tak hanya bersifat lintas budaya, tetapi ada juga yang lintas agama. Misalnya saja *Geguritan Nabi Yusuf*, yang ditemukan dalam tiga (versi) naskah di Bali. Kisah ini bercorak Islam, ditulis dalam huruf Bali gaya Sasak (Suarna 1991; Riana 2001:302). Karya ini menggunakan bahasa campuran Jawa Tengahan dengan kosa kata Melayu dan Sasak. Fakta linguistik ini menunjukkan bahwa *Geguritan Nabi Yusuf* merupakan hasil perpaduan budaya Jawa, Bali Melayu Sasak dan Arab. Naskah ini memuat silsilah Nabi Yusuf, yang sebagaimana disebutkan dalam Al Quran serta Al Kitab, merupakan nabi umat Islam, juga Kristen. Menariknya, terdapat juga elemen Hindu yang tersurat di dalamnya, yakni penyebutan nama Tuhan Hindu, Hyang. Melihat hal ini, boleh jadi, naskah ini berupaya menawarkan semacam negoisasi budaya dalam hal 'pemersatu umat beragama'.

Sesungguhnya, multikulturalisme mulai mendominasi wacana publik dan akademik di Indonesia sejak awal 2000-an, sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berlarut-larut, meletusnya konflik-kekerasan antar-etnik, dan gerakan-gerakan separatisme di Indonesia. Sebelumnya, istilah yang lebih banyak dipakai adalah pluralisme. Esensi keduanya sama saja, yakni mengakui adanya kemajemukan. Hanya saja perbedaannya terletak pada wilayah atau ruang lingkungannya. Multikultur berarti keberagaman antar-etnik atau bangsa atau entitas, sedangkan pluralisme menekankan kejamakan dalam satu etnik/bangsa dalam satu entitas.

Akan tetapi, penjelasan istilah ini tak boleh hanya berujung pada pemaknaan yang bersifat kuantitatif semata. Sebaliknya, multikulturalisme lebih menekankan aspek kualitatif dalam hubungan antar-etnik dan budaya. Di samping itu, studi tentangnya tak melulu mengkaji sisi eksotisme serta perbedaan suatu suku, rasa atau pun bangsa satu dengan lainnya, melainkan lebih pada interaksi lintas kelompok yang berbeda (O'Sullivan 1989:145). Pendeknya, interaksi atau dialog budaya yang dinamis merupakan prasyarat utama multikulturalisme.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Brian Fay (1998:7), sebagaimana yang dikutip oleh Darma Putra dalam bukunya yang bertajuk Bali dalam Kuasa Politik. Ia menyatakan bahwa ada tiga syarat multikulturalisme, yakni adanya interaksi (interaction) antar-kelompok, keterbukaan (*openness*), dan pembelajaran (*learning*). Untuk itu, istilah perlawanan atau pertentangan (*resistance*) tak terdapat di dalamnya. Sedangkan Melanie Budianta (2003) menggarisbawahi perlunya empati, solidaritas, dan keadilan sosial untuk

mewujudkan masyarakat multikultur. Dari kutipan tersebut, jelaslah tersirat bahwa baik kaum minoritas maupun mayoritas dituntut untuk bersifat terbuka, menghormati satu sama lainnya serta mau belajar dari kelompok lainnya.

Sebuah Titik Tolak yang Bernama Terorisme

Minggu, 12 Oktober 2003, Bali diguncang serangan bom bunuh diri yang dahsyat. Terjadi di Sari serta Paddy's Club yang terletak di bilangan Kuta, salah satu daerah wisata favorit, peristiwa ini alhasil menelan korban hingga sejumlah 200-an orang, yang tak hanya terdiri dari warga asli Bali, tetapi juga turis mancanegara. Sebuah bom berskala kecil juga meledak di Renon, 100 meter dari Konsulat Amerika Serikat.

Beberapa kalangan meramalkan, bahwa peristiwa yang kebetulan didalangi sekelompok umat Islam berhaluan radikal ini akan memicu perseteruan antar agama di Bali. Akan tetapi, rupa-rupanya, prasangka tersebut tidak terbukti sama sekali. Beberapa saat setelah peristiwa naas itu terjadi, tim medis yang juga dibantu oleh penduduk sekitar turut membantu proses evakuasi jenazah. Dengan didasari oleh rasa empati, mereka bahu membahu saling membantu. Solidaritas kemanusiaan merupakan reaksi spontan pertama yang ditunjukkan masyarakat Bali. Bahkan, sehari setelah ledakan, tokoh masyarakat dan pimpinan dari berbagai agama dan lembaga swadaya masyarakat, berkumpul di Kantor Gubernur Bali. Mereka menghimbau kepada segenap warga masyarakat tetap menjaga kedamaian serta keamanan, juga tak terpancing provokasi. Kesemua langkah terbilang ini penting dalam mencegah konflik serta kekerasan di provinsi yang beribukota di Denpasar ini.

Mencermati tindakan dan fenomena Bom Bali ini, dalam artikelnya "After Kuta Bombing, In Search of the Balinese Soul" (2003), Jean Couteau merumuskan sebagian dari reaksi spontan tersebut ke dalam tiga butir. Antara lain gelombang solidaritas kemanusiaan, kecenderungan ke arah ritual, dan politisasi adat yang mengarah pada tindakan-tindakan diskriminatif terhadap penduduk non-Bali (pendatang). Memang, setelah peristiwa pengeboman I di Kuta ini, berbagai langkah pencegahan, utamanya terkait dengan butir ketiga di atas pun diterapkan. Tindakan penertiban penduduk pendatang, yang sesungguhnya merupakan wacana lama di Bali, seketika ditingkatkan sehingga terkesan sebagai sebuah diskriminatif terhadap warga pendatang (non-Bali). Namun kemudian, di Denpasar, seperti halnya kota ibukota provinsi lainnya di Indonesia, langkah ini diupayakan bagi semua penduduk, tak hanya yang berasal dari luar Bali, melainkan juga warga keturunan asli, sehingga tak lagi dianggap sebagai diskriminasi. Secara garis besar, hampir tak ada ketegangan berarti pasca peristiwa ini.

Sikap Kritis dan Empati

Dari ilustrasi di atas, nyata tergambar bahwa Bali mampu menekan potensi konflik antar agama yang mungkin akan terjadi pasca peristiwa berdarah tersebut. Apabila pemerintah bersama segenap masyarakat Bali tak mengambil langkah bijak dan bersikap empati terhadap kejadian ini, dapat dibayangkan betapa besar pengaruh yang diakibatkannya. Perpecahan tak hanya menimpa kehidupan beragama, namun lebih jauh lagi, membuat peluang polemik bagi warga minoritas dan mayoritas, sebagaimana di wilayah Indonesia lainnya.

Di samping itu, berbagai contoh yang telah disampaikan tadi menunjukkan suatu ketahanan tersendiri yang dimiliki masyarakat Bali. Terlepas dari sistem *isolasi* yang diterapkan pemerintah Belanda terhadap Bali, tanpa diduga, pulau ini mewarisi sebuah

sistem budaya yang tak hanya berpedoman pada ajaran lokal saja, melainkan secara sadar memadukannya dengan unsur kultur dari lain agama dan lain budaya. Berbagai wujud akulturasi yang masih tersisa dari perpaduan ini dapat kita amati dalam sekian aktivitas, artefak atau ornamen bentuk maupun dalam tataran yang bersifat filosofis keagamaan, misalnya adanya bagian pemujaan tersendiri bagi *betara* yang beragama Muslim, Cina dan Belanda di Pura Gambur Anglayang, Bangli. Ini berarti, jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Bali telah menyadari keberadaan kelompok luar (walau hanya minoritas) di pulau ini, dan bersamaan dengan itu, lahir suatu upaya untuk menjembatani perbedaan yang ada dan membangun kehidupan bersama yang harmonis yang—secara sadar maupun tidak—didasari semangat multikulturalisme.

Yang penting dikedepankan kini, bukan semata kesadaran akan identitas lokal, melainkan juga kesadaran untuk menemukan identitas bersama, lewat semangat multikultur tadi. Sebab senyatanya, meskipun sikap nasionalisme Bali masih terbilang rendah pada saat pra kemerdekaan, namun justru dengan multikultur yang telah terpelihara selama berabad-abad lamanya itu menunjukkan bahwa sedini itu Bali juga mengakui adanya ke-Indonesia-an dalam wujud yang lebih simbolis, yang boleh jadi lebih mendalam.

Jadi, mungkin tak berlebihan rasanya bila kita analogkan Bali dengan Jalaluddin Rumi atau pun Ahmad Wahib, dua tokoh yang saya singgung di atas. Kita memang bukan siapa-siapa, tak memiliki nama pribadi, kecuali sebuah identitas bersama, yakni Indonesia. Dan sebagai penutup, perkenankan saya untuk mengutip bagian akhir dari sajak Rumi yang bagian pembukanya telah saya tampilkan di awal tulisan ini.

*Maka, tanyakanlah padaku, Siapa Aku?
dan aku tak akan menjawab selain, "Dia."*